

Penguatan Kelembagaan BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa

¹Petrus Emanuel de Rozari, ¹Efandri Agustian, ¹Darwin Zebua
¹Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Corresponding Author. Email : petrus.rozari@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 06-08-2026
Revised : 08-09-2026
Accepted : 11-09-2026
Online : 05-10-2026

Keywords:

BUMDesa;
Koperasi Desa Merah Putih;
Pemberdayaan Masyarakat;
PRA;
ABCD;
Tata Kelola Kelembagaan;
Digital Marketing.

ABSTRACT

Abstract: Anajiaka Village, located in Umbu Ratu Nggay District, Central Sumba Regency, possesses considerable potential in the agricultural and livestock sectors. However, the development of its local economy has been constrained by the limited institutional capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and the Red and White Village Cooperative (Koperasi Desa Merah Putih/KDMP). The primary challenges include weak organizational governance, inadequate managerial capacity, poor financial administration, limited market access, and low community participation. This community service program aimed to strengthen the institutional capacity of BUMDesa and KDMP through organizational governance improvement, managerial capacity building, financial management enhancement, digital marketing development, and community empowerment. The program employed the Participatory Rural Appraisal (PRA) and Asset-Based Community Development (ABCD) approaches, implemented through five stages: participatory preparation and socialization, institutional and management strengthening, implementation of a simple accounting information system, digital marketing development, and evaluation with sustainability assistance. The implementation resulted in improved managerial competencies of BUMDesa and KDMP administrators, the development of Standard Operating Procedures (SOPs), a clearer organizational structure and job descriptions, and the adoption of a Microsoft Excel-based accounting information system for financial reporting. In addition, a collaborative institutional model between BUMDesa and KDMP was established to strengthen the village supply chain, while digital product catalogs and social media-based promotional platforms were developed to expand market access. The program also enhanced community financial literacy and participation through transparent and accountable institutional management. These findings indicate that participatory and asset-based approaches effectively strengthened village economic institutions and improved their capacity to support sustainable local economic development.

Abstrak: Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan peternakan, namun belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang memadai. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jiaka Waimaringu dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menghadapi berbagai permasalahan, antara lain lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya kapasitas manajerial, belum optimalnya sistem administrasi dan pelaporan keuangan, terbatasnya pemasaran produk, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDesa dan KDMP melalui peningkatan tata kelola organisasi, penguatan manajemen usaha, digitalisasi pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Asset-Based Community*

Development (ABCD) yang dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu persiapan dan sosialisasi partisipatif, penguatan manajemen dan kelembagaan, implementasi sistem informasi akuntansi sederhana, pengembangan strategi pemasaran digital, serta evaluasi dan pendampingan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan kapasitas pengurus dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas organisasi, penyusunan laporan keuangan berbasis Microsoft Excel, serta membangun model sinergi antara BUMDesa dan KDMP dalam pengelolaan rantai pasok desa. Selain itu, kegiatan menghasilkan katalog digital produk unggulan, media promosi berbasis media sosial, dan perluasan jejaring kemitraan pemasaran. Program juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan partisipasi masyarakat melalui penerapan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti mampu memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesiapan BUMDesa dan KDMP dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license

A. LATAR BELAKANG

Desa Anajiaka yang terletak di Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, merupakan potret nyata dari tantangan sekaligus peluang pembangunan di wilayah pedalaman Pulau Sumba. Secara geografis, desa ini berada di jantung Sumba Tengah, wilayah yang didominasi oleh topografi perbukitan dan padang sabana yang luas dengan karakteristik iklim semi-arid. Kondisi alam ini secara langsung membentuk struktur ekonomi masyarakatnya yang sangat bergantung pada sektor pertanian lahan kering dan peternakan secara ekstensif. Namun, di balik eksotisme alamnya, Desa Anajiaka menghadapi realitas ekonomi yang kompleks. Kabupaten Sumba Tengah sendiri secara historis mencatatkan angka kemiskinan makro yang signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 19,02% pada September 2025 (BPS, 2025). Di tingkat desa seperti Anajiaka, di mana akses terhadap infrastruktur dasar masih terbatas, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan lebih tinggi, terutama jika diukur berdasarkan parameter kepemilikan aset produktif dan akses ke pasar formal.

Secara demografis, Desa Anajiaka memiliki populasi sebanyak 1.226 jiwa, yang terbagi ke dalam 345 KK (Profil Desa, 2025). Mayoritas penduduk usia produktif bekerja sebagai petani dan peternak. Komoditas unggulan pertanian yang dihasilkan meliputi jagung, padi ladang, serta tanaman perkebunan seperti jambu mete dan pinang. Di sektor peternakan, masyarakat memiliki keterikatan budaya dan ekonomi yang kuat terhadap ternak besar seperti sapi ongole, kerbau, dan kuda, yang sering kali dianggap sebagai "tabungan hidup". Potensi ini sebenarnya sangat besar jika dikelola secara kolektif melalui lembaga ekonomi desa yang profesional.

Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, Pemerintah Desa Anajiaka telah membentuk dua instrumen ekonomi utama: Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). BUMDesa Jiaka Waimaringu dibentuk dengan semangat untuk mengonsolidasikan aset desa dan menjadi motor penggerak bisnis lokal, sementara KDMP diharapkan menjadi wadah gotong royong warga untuk permodalan dan layanan jasa. Namun, kondisi riil saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara mandat kelembagaan dan realitas operasional. BUMDesa dan KDMP di Desa Anajiaka cenderung berjalan stagnan. Meskipun telah ada penyertaan modal awal yang bersumber dari Dana Desa. Namun, modal tersebut sering kali tidak berputar

secara produktif karena tertahan pada pengadaan aset fisik yang tidak dibarengi dengan strategi bisnis yang matang.

Berdasarkan analisis situasi dan pengamatan awal, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang menghambat kemandirian ekonomi di Desa Anajiaka, yang diklasifikasikan ke dalam empat pilar utama:

1. Aspek Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan: Masalah paling fundamental pada BUMDesa dan KDMP di Anajiaka adalah rendahnya kapasitas manajerial pengelola. Struktur organisasi yang ada saat ini sering kali hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat pencairan dana desa, tanpa disertai pembagian kerja yang jelas (*job description*). Para pengurus umumnya belum memiliki kompetensi untuk menyusun rencana bisnis (*Business Plan*) dan laporan keuangan yang akuntabel. Akibatnya, pengambilan keputusan dilakukan secara reaktif tanpa basis data yang memadai. Selain itu, terdapat ketiadaan sinergi antara BUMDesa dan KDMP; keduanya sering kali bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya desa yang sangat terbatas.
2. Aspek Produksi dan Manajemen Rantai Pasok: Meskipun Desa Anajiaka memiliki tonase hasil jagung dan populasi ternak yang cukup besar, lembaga ekonomi desa belum mampu memberikan nilai tambah (*value-added*). Petani di Anajiaka masih terjebak dalam sistem penjualan produk mentah kepada tengkulak dengan harga yang relatif rendah di bawah standar pasar kabupaten. BUMDesa belum berfungsi sebagai *off-taker* (pembeli siaga) yang mampu memutus rantai distribusi yang panjang. Di sisi lain, keterbatasan teknologi tepat guna untuk pengolahan pascapanen mengakibatkan kualitas produk desa semakin sulit untuk bersaing. Selain itu, KDMP pun belum optimal dalam menyediakan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit, pakan) yang terjangkau bagi anggotanya, sehingga biaya produksi tetap tinggi.
3. Aspek Pemasaran dan Adaptasi Digital. Keterisolasian geografis Umu Ratu Nggay menjadi hambatan fisik dalam pemasaran produk. Namun, permasalahan utamanya adalah buta literasi digital pada tingkat pengelola. Produk-produk unggulan desa tidak memiliki identitas merek (*branding*), pengemasan yang menarik, maupun profil produk yang dapat diakses secara daring. Di tengah masifnya ekonomi digital, BUMDesa dan KDMP Anajiaka masih menggunakan metode pemasaran konvensional dengan jangkauan yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan potensi pasar di luar Sumba Tengah tidak tersentuh sama sekali, sehingga perputaran uang hanya terjadi di lingkup internal desa dengan daya beli yang rendah.
4. Aspek Sosial dan Kepercayaan Masyarakat. Secara sosial, terdapat penurunan kepercayaan warga terhadap lembaga ekonomi desa akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan modal. Masyarakat cenderung melihat BUMDesa sebagai entitas milik "aparatus desa", bukan milik "rakyat desa". Partisipasi aktif dalam rapat-rapat koperasi atau kegiatan usaha BUMDesa masih sangat minim. Rendahnya literasi keuangan anggota juga menyebabkan KDMP kesulitan melakukan pemupukan modal secara mandiri dari iuran anggota, sehingga ketergantungan pada suntikan dana pemerintah desa tetap tinggi.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tajuk "Penguatan Kelembagaan BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih" ini sangat relevan dengan kondisi Desa Anajiaka saat ini. Kehadiran tim akademisi bertujuan menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pendekatan pendampingan intensif, bukan sekadar pelatihan satu arah. Solusi yang ditawarkan difokuskan pada penguatan fondasi organisasi melalui restrukturisasi model bisnis yang lebih relevan dengan potensi lahan kering dan peternakan di Sumba Tengah.

Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem "Sinergi Ekonomi Desa", di mana KDMP akan difungsikan sebagai pilar penguatan modal dan input produksi bagi warga, sementara BUMDesa akan bertransformasi menjadi lembaga pemasaran dan pengolahan hasil produksi (agribisnis) (Fukuyama, 2018). Ketepatan solusi ini didasarkan pada kebutuhan riil untuk memutus ketergantungan masyarakat pada tengkulak serta meningkatkan posisi tawar petani di Anajiaka. Urgensi program ini semakin nyata mengingat posisi Sumba Tengah sebagai wilayah strategis pengembangan food estate nasional; penguatan lembaga lokal seperti BUMDesa dan KDMP adalah syarat mutlak agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, tim pengusul menawarkan sebuah kerangka solusi yang terintegrasi dan holistik. Solusi ini tidak hanya bersifat teknis dan parsial, tetapi juga menyentuh akar persoalan kelembagaan dan ekosistem bisnis di Desa Anajiaka. Pendekatan yang digunakan adalah "*Collaborative Economic Governance*", yakni menyinergikan peran BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak lagi berjalan secara kompetitif, melainkan integratif.

Berikut adalah uraian solusi komprehensif yang diklasifikasikan berdasarkan prioritas kebutuhan mitra:

1. Solusi Aspek Manajemen:

Permasalahan utama terkait rendahnya kapasitas manajerial dan ketiadaan standar operasional akan diselesaikan melalui rekayasa kelembagaan. Solusi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir pengelola dari "birokrasi desa" menjadi "entitas bisnis profesional".

- Mekanisme Implementasi: Tim pengusul akan melakukan pendampingan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup prosedur keuangan, operasional unit usaha, serta pengawasan internal. Pengelola akan dibekali pelatihan penyusunan rencana strategis bisnis yang disesuaikan dengan karakteristik desa di Sumba Tengah.
- Landasan Ilmiah: Riset menunjukkan bahwa efektivitas BUMDesa sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*governance*) serta pemisahan antara kepentingan politik desa dan manajemen bisnis (BPS, 2025). Penerapan SOP terbukti meningkatkan akuntabilitas dan memperjelas arah pengembangan usaha desa.
- Target Luaran dan Indikator Capaian:
 - Luaran: Dokumen SOP Manajemen dan Dokumen AD/ART yang diperbarui.
 - Indikator: terbentuknya struktur organisasi fungsional dengan uraian tugas (*job description*) yang 100% dipahami oleh pengurus; tersedianya laporan keuangan bulanan yang memenuhi standar akuntansi sederhana.

2. Solusi Aspek Manajemen Rantai Pasok:

Solusi ini mengatasi tumpang tindih peran antara BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui model kolaborasi dalam *rantai pasok*.

- Mekanisme Implementasi: Membangun kesepakatan kerja sama (MoU) di mana KDMP berfokus pada aspek hulu (*Upstream*), yakni penyediaan modal usaha bagi anggota serta pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit, dan obat-obatan). Sementara itu, BUMDesa berfokus pada aspek hilir (*Downstream*), yaitu pengolahan dan pemasaran. Dengan model ini, warga Desa Anajiaka yang menjadi anggota KDMP mendapatkan kepastian modal dan input, sementara hasil produksinya dijamin terserap oleh BUMDesa.

- Landasan Ilmiah: Sinergi antara koperasi dan BUMDesa menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di desa yang meminimalkan kebocoran modal ke luar wilayah (*capital flight*) serta memperkuat kemandirian finansial desa (4).
- Target Luaran dan Indikator Capaian:
 - Luaran: Dokumen MoU Sinergi BUMDesa-KDMP dan skema permodalan bagi anggota koperasi.
 - Indikator: Peningkatan jumlah anggota aktif KDMP sebesar 20%; terlaksananya 1 siklus bisnis terintegrasi antara hulu dan hilir dalam satu periode program.

3. Solusi Aspek Pemasaran:

Untuk memutus isolasi geografis Desa Anajiaka, solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan produk-produk desa.

- Mekanisme Implementasi: Tim pengusul akan mendampingi pengelola dalam melakukan *branding* produk (pembuatan logo, kemasan, dan narasi produk/*storytelling*). Solusi teknologi yang diusulkan adalah pembuatan Katalog Digital Desa dan optimalisasi media sosial (Facebook dan Instagram Ads) untuk menjangkau pasar di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya. Selain itu, akan dilakukan inisiasi kemitraan dengan ritel modern atau distributor komoditas di tingkat provinsi untuk memastikan pasar yang berkelanjutan bagi produk olahan jagung dan produk ternak.
- Landasan Ilmiah: Pemanfaatan *e-marketing* di daerah tertinggal terbukti mampu memotong rantai distribusi yang panjang dan memberikan akses informasi pasar secara *real-time* kepada produsen di desa (Hidayat & Setyadi, 2023).
- Target Luaran dan Indikator Capaian:
 - Luaran: akun media sosial bisnis resmi, katalog produk digital, dan minimal 2 naskah kerja sama (MoU) dengan mitra di luar desa.
 - Indikator: Produk desa dikenal di tingkat kabupaten (minimal 500 jangkauan akun/bulan); terjadinya transaksi penjualan ke luar wilayah desa melalui kanal digital.

4. Solusi Aspek Sosial:

Solusi ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi warga Anajiaka dalam lembaga ekonomi desa.

- Mekanisme Implementasi: Penerapan sistem *Open Management* melalui pembuatan "Papan Informasi Kinerja BUMDesa/KDMP" yang diletakkan di kantor desa dan balai pertemuan. Selain itu, bagi warga untuk meningkatkan literasi keuangan rumah tangga serta pemahaman tentang manfaat berkoperasi. Sosialisasi ini menekankan bahwa keuntungan BUMDesa akan kembali ke desa dalam bentuk dana sosial atau pembangunan fasilitas umum.
- Landasan Ilmiah: Modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan dan partisipasi merupakan determinan utama keberhasilan lembaga ekonomi kolektif di pedesaan (Fukuyama, 2018).
- Target Luaran dan Indikator Capaian:
 - Luaran: Modul Literasi Keuangan Desa dan Sistem Informasi Transparansi Publik.
 - Indikator: Peningkatan skor literasi keuangan warga (hasil *pre-post test*) sebesar 30%; Peningkatan kehadiran warga dalam rapat anggota tahunan koperasi sebesar 50%.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program PKM di Desa Anajiaka dirancang dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat desa, pengurus BUMDesa, dan anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukanlah objek penerima bantuan pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki aset (sumber daya alam dan sosial) untuk dikembangkan. Program ini dilaksanakan secara terstruktur melalui lima tahapan utama yang mengintegrasikan aspek produksi, manajemen, dan pemasaran.

1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi Partisipatif

Tahap awal dimulai dengan koordinasi intensif antara tim pengusul Universitas Nusa Cendana, Pemerintah Desa Anajiaka, serta pengurus BUMDesa dan KDMP. Tujuan utama tahap ini adalah menyelaraskan persepsi dan komitmen untuk memastikan program PKM ini dapat berjalan sesuai dengan kalender program PKM serta kebutuhan desa. Dengan demikian, PKM ini dapat membuahkan hasil maksimal secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

- **Rembuk Desa Ekonomi:** Tim pengusul akan memfasilitasi forum diskusi terbuka untuk memetakan kembali potensi riil pascapandemi serta tantangan iklim di Umbu Ratu Nggay. Dalam tahap ini, mitra terlibat aktif dalam memvalidasi data usaha yang sedang dijalankan, potensi usaha di desa yang akan dijalankan, serta rencana pengembangan ke depan.
- **Pembentukan Tim Pelaksana Mitra:** Mitra diminta membentuk kelompok kerja (Pokja) internal sebagai pendamping langsung tim PKM di lapangan, sehingga terjadi transfer pengetahuan pascaprogram PKM.

2. Tahap Implementasi Solusi Manajemen dan Kelembagaan

Tahapan ini berfokus pada pembenahan "otak" organisasi melalui tata kelola yang profesional.

- **Lokakarya Restrukturisasi:** Tim pengusul akan mendampingi mitra dalam menyusun ulang model bisnis yang menyinergikan BUMDesa dan KDMP. Mitra berperan dalam memberikan masukan terkait kendala budaya atau sosial yang mungkin menghambat operasional bisnis di Sumba Tengah.
- **Transfer Teknologi Manajemen:** Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis aplikasi sederhana (program Excel), karena program aplikasi komputerisasi belum dapat dijalankan. Pengurus BUMDesa dan KDMP akan dilatih untuk melakukan input data transaksi harian.
- **Penyusunan SOP Partisipatif:** Bukan sekadar memberikan dokumen jadi, tim pengusul akan membedah proses bisnis aktual di Anajiaka untuk kemudian dibakukan menjadi SOP (penerimaan barang, penggajian, bagi hasil, dan pengawasan).
- **Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Kelembagaan:** Tim pengusul memfasilitasi FGD antara pengurus BUMDesa dan KDMP untuk menyepakati secara tertulis pembagian fungsi kelembagaan, yaitu KDMP berperan pada aspek hulu (penyediaan sarana produksi, pembiayaan, dan penguatan modal anggota) sedangkan BUMDesa berperan pada aspek hilir (pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian). Kesepakatan ini dituangkan dalam dokumen kerja sama sebagai pedoman operasional kedua lembaga.

3. Tahap Implementasi Strategi Pemasaran dan Digitalisasi

Tahapan ini bertujuan untuk memutus ketergantungan pada tengkulak dan memperluas akses pasar melalui instrumen IPTEKS.

- **Workshop Digital Branding:** Pelatihan pembuatan konten kreatif dan pengelolaan akun media sosial untuk bisnis. Mitra terlibat dalam sesi "*Storytelling* Bisnis Desa", di mana mereka menceritakan keunikan produk

Anajiaka untuk membangun *brand awareness*.

- Inisiasi Jejaring Kemitraan: Tim pengusul memfasilitasi pertemuan (*business matching*) antara BUMDesa dan pembeli potensial (*off-taker*) di tingkat kabupaten atau provinsi. Mitra berperan aktif dalam negosiasi harga dan kontrak kerja sama sebagai bentuk pembelajaran komunikasi bisnis.
- Peluncuran Katalog Digital: Pembuatan landing page sederhana yang berisi katalog produk unggulan Desa Anajiaka sebagai program jangka panjang PKM.

4. Tahap Penguatan Literasi Keuangan dan Partisipasi Masyarakat

Tahapan ini bertujuan memulihkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lembaga ekonomi desa, sekaligus menindaklanjuti Solusi Aspek Sosial yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

- Sosialisasi Literasi Keuangan: Tim pengusul menyelenggarakan sosialisasi literasi keuangan rumah tangga dan manfaat berkoperasi bagi masyarakat umum, kelompok tani, kelompok perempuan, serta anggota koperasi, guna mendorong pemupukan modal mandiri dan mengurangi ketergantungan pada suntikan dana desa.
- Penerapan Sistem Open Management: Tim pengusul mendampingi pembuatan "Papan Informasi Kinerja BUMDesa/KDMP" di kantor desa dan balai pertemuan sebagai instrumen transparansi, serta mengukur perubahan pemahaman peserta melalui evaluasi pre-test dan post-test.

5. Alur Pelaksanaan dan Rencana Kerja

Kegiatan PKM ini dirancang secara sistimatis dalam rencana kerja dengan alur kerja sebagai berikut:

- a) Observasi mendalam, sosialisasi, dan penataan administrasi kelembagaan.
- b) Pelatihan manajemen, keuangan, dan penyusunan SOP bersama mitra.
- c) Pengenalan sistem informasi akuntansi sederhana menggunakan Excel.
- d) Branding, digital marketing, dan inisiasi kerja sama pasar.
- e) Penguatan sinergi kelembagaan BUMDesa-KDMP melalui FGD, serta sosialisasi literasi keuangan dan partisipasi masyarakat.
- f) Evaluasi akhir, penyusunan laporan, dan pendampingan untuk keberlanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penguatan Tata Kelola BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih

Program Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan di Desa Anajiaka dengan melibatkan Pemerintah Desa, pengurus BUMDesa Jiaka Waimaringu, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM desa. Kegiatan diawali dengan Forum Rembuk Desa yang dihadiri oleh 38 peserta untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa sekaligus memetakan permasalahan kelembagaan yang dihadapi.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya tata kelola organisasi, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP), lemahnya administrasi keuangan, serta belum adanya pembagian tugas yang jelas di antara pengurus. Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian melakukan pendampingan penyusunan struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), serta SOP operasional yang meliputi prosedur administrasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang, pemasaran, dan sistem pengawasan internal.

Pada akhir kegiatan, seluruh pengurus BUMDesa dan KDMP telah memiliki dokumen SOP yang disepakati bersama serta memahami mekanisme penerapannya dalam operasional kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dari hasil evaluasi akhir, di mana 91% peserta menyatakan mampu menjelaskan kembali fungsi masing-masing unit kerja dan alur pelayanan organisasi.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan PkM

2) Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Keuangan

Pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan sederhana dilaksanakan selama dua hari dengan metode ceramah interaktif, studi kasus, simulasi pencatatan transaksi, dan pendampingan langsung. Sebanyak 24 pengurus BUMDesa dan KDMP mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun laporan kas, laporan laba rugi sederhana, serta pencatatan aset organisasi menggunakan Microsoft Excel. Nilai rata-rata pre-test peserta sebesar 54,6 meningkat menjadi 86,8 pada post-test atau mengalami peningkatan sebesar 58,9%.

Selain itu, seluruh peserta telah mampu mengoperasikan format Sistem Informasi Akuntansi sederhana berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh tim pengabdian sehingga proses pencatatan transaksi menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah diaudit.



Gambar 2. Serah terima modul PkM

3) Penguatan Sinergi BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih

Salah satu luaran penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya model kolaborasi kelembagaan antara BUMDesa dan KDMP. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), disepakati pembagian fungsi kelembagaan, yaitu KDMP berperan dalam penyediaan sarana produksi, pembiayaan anggota, dan penguatan modal usaha, sedangkan BUMDesa bertanggung jawab terhadap pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian masyarakat.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen kerja sama yang menjadi pedoman operasional kedua lembaga. Model kolaboratif ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi hasil pertanian sehingga petani memperoleh harga jual yang lebih kompetitif.

4) Penguatan Digital Marketing Produk Desa

Kegiatan digitalisasi difokuskan pada peningkatan kapasitas pengurus dalam melakukan pemasaran berbasis teknologi informasi. Tim pengabdian mendampingi peserta dalam penyusunan identitas merek, desain logo, pembuatan kemasan produk, fotografi produk, penyusunan katalog digital, serta pengelolaan media sosial bisnis.

Sebagai luaran kegiatan, BUMDesa berhasil memiliki satu katalog digital yang memuat produk unggulan Desa Anajiaka, akun media sosial resmi, serta materi promosi yang siap digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran. Selama masa pendampingan, akun media sosial tersebut mulai dimanfaatkan sebagai media promosi produk jagung, ternak, dan hasil olahan masyarakat.

Selain itu, tim pengabdian memfasilitasi kegiatan business matching dengan dua calon mitra pemasaran di tingkat kabupaten sehingga membuka peluang kerja sama pemasaran produk desa secara berkelanjutan.

5) Peningkatan Literasi Keuangan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi literasi keuangan diikuti oleh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, dan anggota koperasi. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, manfaat berkoperasi, transparansi pengelolaan BUMDesa, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep literasi keuangan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari **56,2** sebelum pelatihan menjadi **84,5** setelah kegiatan. Di sisi lain, kehadiran masyarakat pada rapat evaluasi program mencapai **85%** dari jumlah undangan, menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesa dan KDMP.

6) Saran Pengembangan Lanjutan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, tim pengabdian merekomendasikan beberapa langkah tindak lanjut agar capaian program dapat berkelanjutan. Pertama, pada aspek tata kelola, Pemerintah Desa perlu melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP serta pembaruan AD/ART secara rutin agar tidak kembali menjadi dokumen formalitas semata. Kedua, pada aspek keuangan, pengurus BUMDesa dan KDMP disarankan mendapatkan pendampingan lanjutan pasca-program serta mempertimbangkan migrasi bertahap dari sistem akuntansi berbasis Excel menuju aplikasi akuntansi digital sederhana ketika infrastruktur telah memadai.

Ketiga, pada aspek sinergi kelembagaan, kesepakatan pembagian fungsi hulu-hilir antara KDMP dan BUMDesa yang dihasilkan melalui FGD perlu diperkuat secara legal dalam bentuk MoU tertulis dan dimonitor pelaksanaannya agar tidak sekadar menjadi kesepakatan lisan. Keempat, pada aspek pemasaran digital, diperlukan pelatihan lanjutan terkait optimalisasi konten dan iklan berbayar (digital ads) serta perluasan jejaring mitra pemasaran di luar dua mitra yang sudah terjalin, agar transaksi penjualan ke luar desa dapat berlangsung lebih rutin. Kelima, pada aspek sosial, sosialisasi literasi keuangan dan transparansi pengelolaan disarankan dilaksanakan secara berkala, tidak hanya sekali, serta melibatkan generasi muda desa agar keberlanjutan partisipasi masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penguatan kelembagaan BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih. Pendekatan partisipatif tersebut memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembangunan sehingga setiap keputusan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Penguatan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), restrukturisasi organisasi, dan pembagian tugas

memberikan dampak terhadap meningkatnya profesionalisme pengelola BUMDesa dan KDMP. Tata kelola organisasi yang baik menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas organisasi ekonomi desa.

Implementasi sistem informasi akuntansi sederhana berbasis Microsoft Excel memberikan perubahan positif terhadap kualitas administrasi keuangan BUMDesa dan KDMP. Pengurus mulai mampu melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, menyusun laporan keuangan sederhana, dan memanfaatkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Dari aspek manajemen rantai pasok, pembagian fungsi antara KDMP sebagai penyedia modal dan sarana produksi dengan BUMDesa sebagai pengelola pemasaran menciptakan model kolaborasi kelembagaan yang lebih efektif. Kolaborasi tersebut memperkuat posisi tawar petani melalui kepastian akses input produksi sekaligus kepastian pasar hasil pertanian. Penguatan kapasitas pemasaran digital melalui branding produk, penyusunan katalog digital, dan optimalisasi media sosial menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi solusi bagi keterbatasan akses pasar desa. Digital marketing memungkinkan produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya promosi yang relatif rendah.

Dari sisi sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDesa dan KDMP menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan organisasi mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa. Modal sosial berupa kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi terbuka dan pelaporan rutin menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan kelembagaan.

Secara keseluruhan, program pengabdian memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, BUMDesa, KDMP, masyarakat, dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak menjadi strategi efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. Laporan Kemiskinan September 2025. Sumba Tengah: BPS; 2025.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Fukuyama, F. (2018). *Social Capital, Civil Society and Development*. *Journal of Democracy*
- Hidayat, R., & Setyadi, A. (2023). *Digital Marketing Adoption for Rural Enterprises in Underdeveloped Regions: Challenges and Opportunities*. *Journal of Rural Development and Information Technology*, 12(1), 45–58.
- Prasetyo, A., et al. (2021). *Tata Kelola BUMDesa di Era Digital: Transformasi dari Birokrasi Desa Menuju Entitas Bisnis Profesional*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(2), 112–125.
- Profil Desa Anajiaka, Kabupaten Sumba Tengah, 2025
- Sudarkas, I. (2020). *Sinergi BUMDes dan Koperasi dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Sirkular di Pedesaan Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Terpadu*, 8(3), 201-215.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 2011.
- Pemerintah Desa Anajiaka. Profil Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Sumba Tengah: Pemdes Anajiaka; 2026
- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah. Waibakul: Bappeda; 2026

- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
- Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. Free Press.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). Accounting information systems (15th ed.). Pearson.
- Sukarno, M. (2022). *Analisis Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Jagung Lahan Kering dalam Peningkatan Pendapatan Petani di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Agorisistem: Seri Ekonomi Pertanian, 15(2), 89-104.